



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No.1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin 7161
dpmptstransnaker.balangankab.go.id

BERITA ACARA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA SKPD

NOMOR : 050/43 /DPMPTSPTK-BLG/2024

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk melakukan dialog kinerja dan monitoring kinerja melalui :

- a. Penetapan target awal tahunan dalam penyusunan Perjanjian Kerja;
- b. Monitoring evaluasi atas implementasi pelaksanaan perjanjian kerja melalui monitoring pencapaian target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan secara triwulan;
- c. Monitoring kinerja tahunan melalui upaya perbaikan akuntabilitas SKPD berdasarkan rekomendasi APIP yang tertuang dalam dokumen LHE SAKIP SKPD.

Dialog dan monitoring kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c dilakukan secara manual dan melalui aplikasi (E-KINO) oleh masing-masing SKPD. Hal ini juga merupakan wujud pengawasan melekat atasannya kepada bawahan dalam menjamin pelaksanaan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan SKPD.

Berikut kami sajikan hasil dialog dan monitoring kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c sebagai lampiran dari laporan monitoring dan evaluasi kinerja ini, yakni berupa:

- a. Tangkapan *layer entrain* data monev rencana aksi atas PK halaman pertama;
- b. Tangkapan *layer entrain* data monev rencana aksi atas LHE SAKIP SKPD;
- c. PDF ataupun excel monev rencana aksi atas PK yang telah ditandatangani Kepala SKPD;
- d. PDF ataupun excel monev rencana aksi LHE SAKIP SKPD yang telah ditandatangani Kepala SKPD

Paringin, 8 Januari 2024

Kepala SKPD,



Screenshot LHE SAKIP pada Ekino

LHE SAKIP

ekino.balangankab.go.id/Lhe

All Bookmarks

Admin
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja +

LHE SAKIP

Home / Transaksi / LHE SAKIP

Period

2021 s/d 2026

Tahun

2023

Nilai Skip N-1

Periode	Tahun	Nilai Skip N-1	Hasil Evaluasi	Rekomendasi Menpan/Inspektorat	Rencana Aksi Balangan	Progres Aksi	File	Hapus
2021 s/d 2026	2023	70,60 (BB)	1. Evaluasi perencanaan kinerja belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan rencana aksi kinerja belum sepenuhnya dapat bersifat dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. 2. Evaluasi pengukuran kinerja belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, pimpinan belum sepenuhnya selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja, data kinerja yang dilakukan belum sejalan dengan relevansinya, meskipun capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pemimpinan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. 3. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkuilat sesuai dengan standar 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar, belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, 5. Analisis capaian kinerja (outcome) belum memadai.	1. Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD. 2. Membuat laporan monev menunjukkan realisasi target setiap triwulan 3. Membuat laporan monev dilengkapi dengan notulen/berita acara 4. Dalam pengukuran kinerja memuat sumber daya yaitu laporan kegiatan peranama modal (LKP) serta melaksanakan, memerlukan dan melakukan analisis atas penggunaan anggaran dan 5. Dalam pengukuran kinerja menjadikan dasar utama perempongan/penugasan jabatan untuk struktural maupun fungsional 6. Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJ) memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti perempongan/penugasan jabatan untuk struktural maupun fungsional 7. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD. 7. Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJ) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen. 8. Untuk menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal 9. Mendifinadikti rekomenadasi pada LHE AKIP Tahun sebelumnya dengan indikator peringkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya. 10. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.	1. Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal 2. Memperbaiki isi laporan monev per triwulan agar menggambarkan realisasi target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap triwulan 3. Memperbaiki laporan kegiatan peranama modal (LKP) dimulai sejaknya dengan pengukuran capaian, memerlukan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran sesuai PerMenpan RB No 53 Tahun 2014 5. Dalam pengukuran kinerja menjadikan dasar usulan perempongan/penugasan jabatan untuk struktural maupun fungsional 6. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD. 7. Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJ) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen. 8. Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal 9. Mendifinadikti rekomenadasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya dengan indikator peringkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya. 10. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.	1. DPMPSTPTK telah melakukan perencanaan kinerja tahunan untuk memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam anggaran, 2. Hasil pengukuran kinerja dimulai sejaknya dengan pengukuran capaian, memerlukan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran sesuai PerMenpan RB No 53 Tahun 2014 5. Dalam pengukuran kinerja menjadikan dasar usulan perempongan/penugasan jabatan untuk struktural maupun fungsional 6. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD. 7. Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJ) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen. 8. Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal 9. Mendifinadikti rekomenadasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya dengan indikator peringkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya. 10. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.	RENCANA AKSI LHE SAKIP DPMPSTPTK.pdf	

25°C
Berawan

Search

08:41
23/02/2024

Screenshot Halaman Depan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI LHE SAKIP
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Periode	Tahun	Nilai Sakip N-1	Hasil Evaluasi	Rencana Aksi Balangan	Progres Aksi
2021 s.d 2026	2023	70,60 (BB)	1 Evaluasi perencanaan kinerja belum sepuhnya terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan rencana aksi kinerja belum sepenuhnya dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	1 Manusius dan menerapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal 2 Membuat laporan money menunjukkan program, kegiatan dan sub kegiatan realisasi target setiap triwulan 3 Membuat laporan money dilengkapi dengan notaensi/bentra acara	1 DPM/PTSPT/Kelanjutan melakukan pengukuran kinerja/penilaian SKPD serta akuntabilitas kinerja internal untuk memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemanfaatan dalam anggaran 2 Hasil pengukuran kinerja ditambahkan dengan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 3 Peninjauan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan dilindaklanjuti dengan pengisian di aplikasi e-kino, mengupload di google drive turkin 4 Menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman teknis perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal
		2	Evaluasi pengukuran kinerja belum sepuhnya terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, belum sepenuhnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur sepuhnya setelah terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja, data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja belum sepenuhnya mendekat desar dalam penempatan/penghapusan jabatan untuk struktural maupun fungisional.	4 Dalam pengukuran kinerja membuat sumber daya yaitu laporan kegiatan penanaman modal (LKPNM) serta melaksanakan, membuktai, dan membuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	5 Melakukan Evaluasi atas dokumen LKPNP RB No 53 Tahun 2014 Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan untuk struktural maupun fungisional Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD
		3	Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkuilas sesuai dengan standar	5 Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan untuk struktural maupun fungisional Menyusun dokument laporan kinerja (LKjIP) memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran anggaran dengan penitungan sesuai dengan hitungan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	6 Mengajukan permintaan reviu LKjIP tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD
		4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya terdapat standar, belum sepuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Analisis capaian kinerja (outcome) belum memadai.	7 Menyusun dokument laporan kinerja (LKjIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit,yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen	7 Menyusun dokument laporan kinerja (LKjIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit,yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen
		5		8 Untuk menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal	8 Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal
				9 Mengajukan rekomendasi pada LHE AKIP Tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya	9 Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya.
				10 Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.	10 Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.



KURKIN E-KINO TRIWULAN I
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi	Atas Realisasi Capaian Triwulan TW I	Kendala Pencapaian Target Triwulan TW I	Rencana Aksi Efektif dan Efisien	Catatan Keselarasan Anggaran dan Kinerja	Kinerja RPJMD yang Realisasi	Catatan Evaluasi Kementerian RB
			PK	Renstra	Renja							
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja												
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Realisasi Investasi	256.590.000.000	250.590.000.000	250.590.000.000	250.590.000.000	250.590.000.000 Sesuai	Realisasi Investasi Tim Pengawas dan Optimalisasi peran Tim Penanaman Modal belum Optimal	Penegakan Peraturan	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	53,74%
2	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka (PTT)	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka (PTT)	2,40%	2,40%	2,40%	0 Sesuai	*annual/per tahun	Modal masih belum maksimalnya dengan perusahaan	Angka Pengangguran Terbuka	0	Angka Pengangguran Terbuka	0
3	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP TIK Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP TIK Perizinan	88,00	88,00	88,00	0 Sesuai	*annual/per tahun	Perusahaan Terbagi Kejayaan dan Lemah	Sosialisasi ke Berusaha melalui kecamatan OSS RBA masih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	0
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja												
1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan Perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 71 (B)	71 (B)	71 (B)	71 (B)	0 Sesuai	beberapa kegiatan tidak berorientasi internal	Meningkatkan koordinasi dan pengendalian internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja	0	Nilai Akuntabilitas Kinerja	0
2	Meningkatnya Persentase Pencatatan Aset Pelajaran Sarana dan Prasarana dan Administrasi Peaporan	Persentase Pencatatan Aset Pelajaran Sarana dan Prasarana dan Administrasi Peaporan	Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	25% Sesuai	beberapa sparsa dalam kondisi kurang baik	Persentase Pencatatan Aset dalam Kondisi Baik	25%	Persentase Pencatatan Aset dalam Kondisi Baik	25%
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan												
1	Tersusunnya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Perencanaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang	100%	100%	100%	100%	25% Sesuai	25%	25%	25%	25%	25%
Kepala Sub Bagian Keuangan												
1	Tersusunnya Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Keterikutan yang	100%	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepengawalian												
1	Tersusunnya Data Kepengawalian	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepengawalian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	25% Sesuai	25%	25%	25%	25%	25%
2	Telahkananya Peningkatan Kapasitas SDM	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
3	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Serta Administrasi	Waktu Penelihiran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Sesuai	3 Sesuai	3 Sesuai	3 Sesuai	3 Sesuai	25%
4	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Serta Administrasi	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 Sesuai	3 Sesuai	3 Sesuai	3 Sesuai	3 Sesuai	25%

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Ilmiah, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
1 Meningkatnya Pengembangan Duni Usaha	Jumlah kerjasama Pemberdayaan 2 Kerjasama	2 Kerjasama	0 Sesuai	Sulitnya membangun	Fasilitasi kemitraan	0
2 Meningkatnya Pengembangan yang dapat dikembangkan untuk Daerah	1 Potensi Investasi 1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	0 Sesuai	Belum adanya bahan investasi yang siap	Menyusunkan dokumen kajian investasi yang	0
3 Meningkatnya Nilai Persetujuan Investasi/Rencana investasi	210.000.000.000	210.000.000.000	12.398.800.000 Sesuai	Pelaku usaha kesulitan dalam pelaporan	Pelaporan dilaorari LKPM	6%
4 Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Percentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	25% Sesuai	25%	25%
JF Analis Kebijakan Ahli Muda						
1 Tersedianya Regulas/Produk hukum/derah	Jumlah Peraturan Daerah terkait 1 Perda	1 Perda	0			0
2 Terlaksananya Penetapan Kawasan terpetakan Potensi Investasi	Jumlah Potensi Investasi yang penanaman Modal	1 Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen Peta Potensi			0
3 Terselegaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan realiasi penanaman Modal	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan		25%
4 Terlaksananya Promosi Investasi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan		25%
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha						
1 Meningkatnya Peayanan	Percentase Pemohonan Perizinan dari Non Perizinan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2 Meningkatnya Peayanan Perizinan dan Non Perizinan	Percentase Pemohonan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan penanaman	100%	100%	100%	100%	100%
JF Analis Kebijakan Ahli Muda						
1 Terselenggaranya Peayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Secara	Percentase Pemohonan Perizinan Berusaha	100%	100%	100%	100%	100%
2 Terselenggaranya Peayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Secara	Percentase Pemohonan Perizinan Non Berusaha	100%	100%	100%	100%	100%
Kepala Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
1 Meningkatnya Peayanan Data dan Informasi	Percentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	100%	Masih ada polayan belum kan dengan	100%
2 Meningkatnya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan	Percentase Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal	100%	100%	100%	Belum adanya mengudakan bilik/ruang fasilitas yang khusus tersedia	100%
JF Analis Kebijakan Ahli Muda						
1 Terlaksananya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	0		0
2 Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	Percentase Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%		100%
3 Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	100%	100%	100%		100%
4 Terkelayanye Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Percentase Updateing Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%		100%

Bendahara	Jumlah Dokumen daftar transaksi harian/bulanan	100%	100%	100%	25%
1 Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laboran pertanggungjawaban fungsional	100%	100%	100%	25%
2 Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laboran Pertanggungjawaban Administratif	100%	100%	100%	25%
3 Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Buku Pembantu Pajak	100%	100%	100%	25%
4 Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pajak Bulanan	100%	100%	100%	25%
5 Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pajak Bulanan	100%	100%	100%	25%
Pengadministrasi Umum					
1 Tersedianya Data Keamanan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Surat Masuk	200	200	200	98%
2 Tersedianya Bahan Pengelompokan surat atau dokumen kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelompokan Surat atau Dokumen	200	200	200	98%
3 Tersedianya Bahan Dokumentasi Surat Manyurat	Jumlah Laporan Dokumentasi Surat Manyurat	200	200	200	98%
Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja					
1 Terwujudnya Kesiapan Rencana Tenaga Kerja	Percentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	70%	70%	70%	0
2 Terlaksananya Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	140 Orang	140 Orang	55 Orang	39,29%
3 Terwujudnya Perlisanan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Tenaga Kerja (RTK) Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0
4 Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	0
5 Terwujudnya Perlisanan Kelembagaan	Jumlah Tenaga Kerja yang ciberdakyan Melalui Program Perluasan Kesematan Kerja	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%

JF Pengantar Kerja Ahli Muda						
1 Terwujudnya Penyalinan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	120 Orang	120 Orang	120 Orang	55 Orang	45,83%
2 Terlaksananya Penyalinan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyalinan dan Bimbingan Jabatan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%
3 Terselesaikannya Unit Layanan	Jumlah Tenaga kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Dilayani ULD	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	0
4 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah LPKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang	2 Lemabaga	2 Lemabaga	2 Lemabaga	0	0
5 Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	20 Orang	20 Orang	20 Orang	0	0
6 Terlaksananya PMI Pemberdayaan PMI	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan Purna Penempatan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	0	0
JF Pengantar Kerja Ahli Muda						
1 Terwujudnya Perilisan Kelemparan Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang Diberdayakan Melalui Program Penrusan Kelemparan Kerja	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%
Analisis Tingkat Kerja						
1 Menyiapkan Bahan	Jumlah Dokumen Analisis Data	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
Pencari Kerja	Pencari Kerja Terdaftar					
2 Menyiapkan Bahan	Jumlah Dokumen Analisis Data	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
Analisis Data Lowongan/Permit kerja	Lowongan/Permintaan Tenaga kerja					
3 Menyiapkan Bahan	Jumlah Dokumen Analisis Data	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
Data Informasi Pasar Kerja	Informasi Pasar Kerja					
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial						
1 Meningkatnya Pencari Kerja yang Terampil	Percentase Tenaga kerja yang kompeten/Bersertifikasi Kompetensi	4%	4%	4%	0	0
2 Terlaksananya Pengelitian Kemlembagaan	Percentase Penyelesaian Percelitian Hubungan Industrial Yang difasilitasi	100%	100%	100%	0	0
3 Terlaksananya Rengatan Kemlembagaan	Percentase Perusahaan yang Memiliki Sarana Hubungan Industrial	100%	100%	100%	0	0
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda						
1 Terlaksananya Pembinaan Perusahaan yang memiliki PP/PKB/PKWT	Percentase perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	100%	100%	100%	0	0%
2 Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial yang Akhirnya...	Percentase Perselisihan Hubunga Industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	100%	100%	100%	0	0%
JF Pengantar Kerja Ahli Muda						
1 Terlaksananya Pembinaan Perusahaan yang memiliki Swasta	Percentase Lembaga Pelatihan kerja Swasta yang terakreditasi	100%	100%	100%	0	0%

Kepala Bidang Transmigrasi					
1 Meningkatnya Persentase Warga Transmigrasi yang Terampil	16%	16%	16% 1.6%		10%
2 Meningkatnya Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga Transmigrasi	19,05%	19,05%	19,05%		99,25%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda					
1 Telaksananya jumlah Warga Transmigrasi yang Terampil	20 Orang	20 Orang	2 Orang		0,1%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda					
1 Telaksananya lahan yang dapat dielola oleh warga transmigrasi di kawasan transmigrasi	64.77 ha	64.77 ha	64.05 ha		99,25%
Penyalur Transmigrasi					
1 Telaksananya jumlah kepala keluarga Transmigrasi yang dibina kegiatan SDM	20 kk	20 kk	10 kk		50%
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja					
1 Telaksananya Persentase Pencari Kerja yang memiliki Keterampilan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	100%	100% 28,57%		28,57%
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris					
1 Tersedianya Data kebutuhan barang inventaris kantor kegiatan Sub	12	12	12		25%
2 Tersedianya Bahan Konsep Penyusunan Kebutuhan Barang Inventaris	2	2	2		50%
3 Tersedianya Bahan Pengklasifikasian Kebutuhan Barang Inventaris	120	120	120		28%
4 Tersedianya Bahan Laporan Rekaman Kegiatan Sub	12	12	12		25%
Rekaman Kegiatan Sub					

Mengetahui

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Masuk Kabupaten Tenaga Kerja



MAP

1

002

KURKIN E-KINO TRIWUAN II
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSIMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	Data Dukung Atas Realisasi Capaian Triwulan TW II	Kendala Pencapaian Target Triwulan TW II	Renca Aksi	Catatan Efektif dan Efisien	Kinerja RPJMD yang di jawab	Catatan Evaluasi Kemampuan RS
			Pk	Renstra	Renja						
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
1	Meningkatkan Investasi Dalam Roket dan Infrastruktur	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	Belum optimalkan investasi di dalam kota dengan adanya peningkatan infrastruktur dan teknologi	Belum optimalkan investasi di dalam kota dengan adanya peningkatan infrastruktur dan teknologi	Belum optimalkan investasi di dalam kota dengan adanya peningkatan infrastruktur dan teknologi	100%	Berdasarkan hasil UGM Trowulan
2	Menunjang Angga Pengembangan Teritorial (PTT)	Melepas Angga Pengembangan Teritorial (PTT)	2.40%	2.40%	+ 3.08%	Sosial	*Taruhan per tahun (Tahun 2022)	Maka hasil taruhan pada tahun 2022 yang sesuai pada kerangka waktu yang ditentukan	Anggaran Pengembangan Teritorial	100%	
3	Menimbangkan Kualitas Pelayanan Peritiran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTTK	88.00	88.00	+ 88.50	Sosial	*Taruhan per tahun (Tahun 2022)	Hasil tahun 2022 dilakukan data perhitungan dan analisis	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	50%	Survey Anggaran Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan	Nilai Amanatitas Sistem (SAPN)	71 (8)	71 (8)	0				Nila Amanatitas Kinerja	0	
2	Meningkatkan Perekonomian dan Keberadaan Sumber Daya Alam	Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Administrasi Binaan dan Administrasi Pelajarn	100%	100%	100%	50% Sosial			Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Administrasi Binaan dan Administrasi Pelajarn	50%	
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan											
1	Turutmemperbaiki dan memperbaiki Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Beranggaran	Catatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah setelah keremaja yang Benar	100%	100%	100%	50% Sosial				50%	
Kepala Sub Bagian Keuangan											
1	Turutmemperbaiki dan memperbaiki Perencanaan dan Administrasi Keuangan	Catatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah setelah keremaja yang Benar	100%	100%	100%	50% Sosial				50%	
Bendahara											
1	Turbye Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen ditarif teraksesi Harian/ Bulan	100%	100%	100%	50% Sosial				50%	
2	Turbye Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan peringkat/gabungan fungsional	100%	100%	100%	50% Sosial				50%	
3	Turbye Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Peranggaran/tuntutan Administratif	100%	100%	100%	50% Sosial				50%	
4	Turbye Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Buku Lembaran Pajak	100%	100%	100%	50% Sosial				50%	
5	Turbye Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen laporan Buku Lembaran	100%	100%	100%	50% Sosial				50%	
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepengawahan											
1	Turutmemperbaiki dan memperbaiki Evaluasi serta Administrasi Kepjawatan	Catatan Pelaksanaan Administrasi Umum Kepjawatan	100%	100%	100%	50% Sosial				50%	
2	Turutmemperbaiki dan memperbaiki Penitipan dan Penitipan Serti Administrasi Perkantoran	Waktu pembebasan Buku Wajib Dicatat Penitipan Wajib dan Penitipan Serti Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5 Bulan				50%	
3	Turutmemperbaiki dan memperbaiki Penitipan dan Penitipan Serti Administrasi Perkantoran	Waktu pembebasan Buku Wajib Dicatat Penitipan Wajib dan Penitipan Serti Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5 Bulan				50%	
4	Turutmemperbaiki dan memperbaiki Penitipan dan Penitipan Serti Administrasi Perkantoran	Waktu pembebasan Buku Wajib Dicatat Penitipan Wajib dan Penitipan Serti Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5 Bulan				50%	

[Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	12	12	12	6 Sosial
1 Terendah Data kebutuhan barang inventaris berang inventaris kantor Ruang dan Sifat Bahan Umum dan Kepengawahan	Jumlah Data kebutuhan barang inventaris berang inventaris kantor Ruang dan Sifat Bahan Umum dan Kepengawahan	Jumlah Data kebutuhan barang inventaris berang inventaris kantor	2	2 Sosial
2 Terendah Bahan Konsep Kepengawahan Kebutuhan Bahan Inventaris Kegiatan di Bagian Umum dan Kepengawahan	Jumlah bahan konsep Kepengawahan Kebutuhan Bahan Inventaris Kegiatan di Bagian Umum dan Kepengawahan	Jumlah bahan konsep	2	2 Sosial
3 Terendah Bahan Pengklasifikasi Kebutuhan Barang Inventaris	Jumlah Laporan Pengklasifikasi Kebeutuhan Bahan	Jumlah Laporan Pengklasifikasi Kebeutuhan Bahan	120	60 Sosial
4 Terendah Bahan Inventaris Bahan Laporan Kegiatan Sub Bidang Umum Kebutuhan Kepengawahan Ruang Umum dan Kepengawahan	Bahan Laporan Kegiatan Sub Bidang Umum Kebutuhan Kepengawahan Ruang Umum dan Kepengawahan	Bahan Laporan Kegiatan Sub Bidang Umum Kebutuhan Kepengawahan Ruang Umum dan Kepengawahan	12	6 Sosial
[Pengadministrasi Umum				
1 Terendah Data Saya Makuk Kepamanan Kebutuhan Umum dan Kepengawahan	Jumlah Surat Mauk Kepamanan Kebutuhan Umum dan Kepengawahan	Jumlah Surat Mauk	200	200 10% Sosial
2 Terendah Bahan Pengelompokan surat atau dokumen legislatif di subbag Umum dan Kepengawahan	Jumlah Laporan Pengelompokan Surat atau Dokumen	Jumlah Laporan Pengelompokan Surat atau Dokumen	200	200 10% Sosial
3 Terendah Bahan Dokumentasi Jumlah Laporan Dokumentasi Surat	Jumlah Dokumentasi Surat	Jumlah Dokumentasi Surat	200	200 10% Sosial
[Surat Menyurat				
1 Mengendalikan Pengawangan Inventaris Kelebihan dan Keterbatasan Ruang dan Sifat Bahan Umum dan Kepengawahan	Inventaris Kelebihan dan Keterbatasan Ruang dan Sifat Bahan Umum dan Kepengawahan	Inventaris Kelebihan dan Keterbatasan Ruang dan Sifat Bahan Umum dan Kepengawahan	2 Sosial	2 Sosial
2 Mengendalikan Pengembangan Ruang dan Kepengawahan	Jumlah Potensi Investasi Diketahui yang dapat Diambilkan guna untuk dipromosikan	Jumlah Potensi Investasi Diketahui yang dapat Diambilkan guna untuk dipromosikan	1 Potensi Investasi Diketahui	1 Potensi Investasi Diketahui 0 Sosial
3 Mengendalikan Promosi Ruang dan Sifat Bahan Umum dan Kepengawahan	Nilai Perserudian Investasi/Ruang dan Sifat Bahan Umum dan Kepengawahan	Nilai Perserudian Investasi/Ruang dan Sifat Bahan Umum dan Kepengawahan	210.000.000.000	5.117.800.000.000 50% Sosial
4 Mengendalikan Pengembangan Ruang dan Kepengawahan	Persentase Perkiraan Realisasi Promosi dan Kepengawahan	Persentase Perkiraan Realisasi Promosi dan Kepengawahan	100%	100%
[JF Analis Kebijakan Ahli Muda				
1 Terendah Data Produk Produk dan Layanan kebutuhan dan Non kebutuhan dan Kepengawahan	Jumlah Potensi Investasi yang terpelaksana Komunitas dan Kepengawahan	Jumlah Potensi Investasi yang terpelaksana Komunitas dan Kepengawahan	1 Perda	1 Perda 0 Sosial
2 Terendah Kewaspadaan Kewaspadaan Potensi Investasi	Jumlah Potensi Investasi yang terpelaksana	Jumlah Potensi Investasi yang terpelaksana	1 Dokumen Peta Potensi 4 Kategori	1 Dokumen Peta Potensi 4 Kategori 0 Sosial
3 Terendah Pengelolaan Pengelolaan dan Kepengawahan	Jumlah Laporan realisasi penerapan Modal	Jumlah Laporan realisasi penerapan Modal	2 Laporan 4 Kategori	2 Laporan 4 Kategori Sosial
4 Terendah Kewaspadaan Promosi Investasi	Jumlah Penerapan Promosi Investasi	Jumlah Penerapan Promosi Investasi	4 Kategori	4 Kategori 50% Sosial
[Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha				
1 Mengendalikan Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Potensi Investasi Non Berusaha	Jumlah Potensi Investasi Non Berusaha	300%	100% 100% Sosial
2 Mengendalikan Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan dan Non Perizinan	300%	100% 100% Sosial
3 Mengendalikan Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan dan Non Perizinan	300%	100% 100% Sosial
4 Mengendalikan Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan dan Non Perizinan	300%	100% 100% Sosial
[JF Analis Kebijakan Ahli Muda				
1 Terendah Pengelolaan Pengelolaan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penerapan Realisasi dan Non Berusaha	Persentase Penerapan Realisasi dan Non Berusaha	100%	100% 100% Sosial
2 Terendah Pengelolaan Pengelolaan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penerapan Perizinan Berusaha	Persentase Penerapan Perizinan Berusaha	100%	100% 100% Sosial

Kepala Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1 Mengelola Perayinan Data
Perencanaan Data dan Informasi Perizinan dan
Penanaman Modal

2 Mengelola Layanan
Konsultasi dan Pengolahan
Perizinan dan Non Perizinan
Rejeki dan Mayarakat

1 Tercakupnya Survei Indeks
Kepuasan Wajah pelaku
Perizinan dan Non Perizinan
Rejeki dan Mayarakat

2 Penyelesaian Layanan Konsultasi dan
Perizinan Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

3 Tercakupnya Data dan Informasi
Ju mlah Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Sistem Pelayanan Rejeki
Berusaha & Kelembaga

4 Tercakupnya Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
Rejeki dan Mayarakat

Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja

1 Perencanaan Kebutuhan
Tenaga Kerja

2 Tercakupnya Penempatan
Tenaga Kerja

3 Tercakupnya Rekrutmen
Tenaga Kerja

4 Tercakupnya Keterpaduan
Rekrutmen dan Penempatan

5 Meningkatnya Tingkat
Keterpaduan dan
Penempatan

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

1 Tercakupnya Survei Indeks
Kepuasan Wajah pelaku
Perizinan dan Non Perizinan
Rejeki dan Mayarakat

2 Penyelesaian Layanan Konsultasi dan
Perizinan Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

3 Tercakupnya Data dan Informasi
Ju mlah Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Sistem Pelayanan Rejeki
Berusaha & Kelembaga

4 Tercakupnya Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
Rejeki dan Mayarakat

Kepala Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1 Mengelola Perayinan Data
Perencanaan Data dan Informasi Perizinan dan
Penanaman Modal

2 Mengelola Layanan
Konsultasi dan Pengolahan
Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

1 Tercakupnya Survei Indeks
Kepuasan Wajah pelaku
Perizinan dan Non Perizinan
Rejeki dan Mayarakat

2 Penyelesaian Layanan Konsultasi dan
Perizinan Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

3 Tercakupnya Data dan Informasi
Ju mlah Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Sistem Pelayanan Rejeki
Berusaha & Kelembaga

4 Tercakupnya Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
Rejeki dan Mayarakat

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

1 Tercakupnya Survei Indeks
Kepuasan Wajah pelaku
Perizinan dan Non Perizinan
Rejeki dan Mayarakat

2 Penyelesaian Layanan Konsultasi dan
Perizinan Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

3 Tercakupnya Data dan Informasi
Ju mlah Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Sistem Pelayanan Rejeki
Berusaha & Kelembaga

4 Tercakupnya Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
Rejeki dan Mayarakat

Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja

1 Perencanaan Kebutuhan
Tenaga Kerja

2 Tercakupnya Penempatan
Tenaga Kerja

3 Tercakupnya Rekrutmen
Tenaga Kerja

4 Tercakupnya Keterpaduan
Rekrutmen dan Penempatan

5 Meningkatnya Tingkat
Keterpaduan dan
Penempatan

JF Pengantar Kerja Ahli Muda

1 Tercakupnya Rekrutmen Tengah
Kerja (TK) Wajiro

2 Tercakupnya Pengelaman
dalam Pelaksanaan Kegiatan
Rejeki dan Mayarakat

3 Tercakupnya Penempatan
Kemampuan Kerja

4 Meningkatnya Tingkat
Keterpaduan dan
Penempatan

5 Meningkatnya Tingkat
Keterpaduan dan
Penempatan

Analis Tenaga Kerja

1 Mengelola Bantuan dan
Bantuan Tambahan
Terkait Pengembangan
Tenaga Kerja

2 Mengelola Bantuan Analisis Data dan
Lewongan/Permitinan Tenaga
Kerja

3 Mengelola Bantuan Data
Informasi Pekerja

1 Mengelola Bantuan dan
Bantuan Tambahan
Terkait Pengembangan
Tenaga Kerja

2 Mengelola Bantuan Analisis Data dan
Lewongan/Permitinan Tenaga
Kerja

3 Mengelola Bantuan Data
Informasi Pekerja

JF Pengantar Kerja Ahli Muda						
1 Terwujudnya Pelajaran Ahli Muda di Layar dan Aks Kepa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Membentuk Perusahaan dan Asosiasi	120 Orang	120 Orang	55 Orang	55 Orang	55% Sosial
2 Terwujudnya Penyalinan dan Bimbingan Ahli Muda bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Peralihan dan Bantuan Jasman	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%
3 Terwujudnya Unit Layanan Kehutani Terhadap Kelautan dan Konservasi Lingkungan	Inisiatif Terhadap Diklat Basang Medipadam Fasilitas Kepada Ahli Muda	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	0 Sosial
4 Terwujudnya Pengawalan Pengendalian IPTKS	Jumlah IPTKS yang dilakukan Pengawalan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2 Lembar	2 Lembar	2 Lembar	2 Lembar	0 Sosial
5 Terwujudnya Job Fair/Kursus	Inisiatif Bukaan Kerja yang Mendukung Perjalanan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	0 Sosial
6 Terwujudnya Kemandirian PWI/Purwakarta	Jumlah Pihak Pihak Yg Ingin Dididik dan Diketahui	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	0 Sosial
JF Pengantar Kerja Ahli Muda	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Pelatihan Kompetensi Kerja	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%
1 Terwujudnya Pelatihan Kompetensi Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Pelatihan Kompetensi Kerja	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial						
1 Mengelola Sumber Daya Yang Tersedia	Persentase Tingkat Kerja yang Kompetensi/Bersertifikasi Kompetensi	4%	4%	4%	4%	0 Sosial
2 Terwujudnya Pengembangan Kolaborasi dan Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Perserikan Hubungan Industrial yang Efektifitas	100%	100%	100%	100%	100%
3 Terwujudnya Pengembangan Kolaborasi dan Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Memiliki Sertifikat Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda						
1 Terwujudnya Kemandirian dan Keterbukaan Informasi Terhadap Ahli Muda	Persentase perorangan yang Memperoleh Persepsi Perbedaan antara Industri dan Ahli Muda	100%	100%	100%	100%	100%
2 Terwujudnya Pengembangan Kebijakan dan Inisiatif yang Dapat Mendorong dan Meningkatkan Industri Muda	Persentase Perbedaan antara Industri dan Ahli Muda yang dikenakan oleh ahli muda terhadap ahli muda	100%	100%	100%	100%	100%
JF Pengantar Kerja Ahli Muda						
1 Terwujudnya Bantuan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembar Bantuan Kerja Swasta yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%

Kepala Bidang Transmigrasi	<p>1. Mengelola Pengembangan dan Pengembangan Warga Transmigrasi yang Terpadu 2. Mengelola Pengembangan Kewirausahaan dan Kewirausahaan Warga Transmigrasi</p>	Percentase > Wangi Transmigrasi yang terpadu Percentase > Lahan Tersedia yang dibutuhkan untuk mengembangkan Kewirausahaan dan Kewirausahaan warga Transmigrasi	16% 19,05%	36% 19,05%	10% 19,05%	1,60% Sosial 18,84% Sosial	106% 99%
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	<p>1. Terima Konsultasi dan Pengaduan 2. Memberikan Pendapat dan Saran 3. Beri Dukungan dan Bantuan 4. Mengadakan Kegiatan</p>	Luar Lahan yang dapat Warga Ahli Muda Konsultasi dan Pengaduan Berikutnya Berikutnya	64,27/ha 64,77/ha	64,27/ha 64,77/ha	64,25/ha 64,75/ha	Sosial	100%
Penyuluh Transmigrasi	<p>1. Terima Konsultasi dan Pengaduan 2. Memberikan Pendapat dan Saran 3. Beri Dukungan dan Bantuan 4. Mengadakan Kegiatan</p>	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang dilama Komunitas dan satuan Perminatan	20 kkk 20 kkk	20 kkk 20 kkk	10 kk 10 kk	Sosial	50%
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	<p>1. Terelaksirasi Pendidikan dan Kompetensi 2. Terelaksirasi pelatihan dan pelatihan</p>	Jurusan Dokumen Penitiran Bencana Keterlibatan Peran Kepala Keluarga Transmigrasi Keterkaitan dengan Satuan kerja	100% 100%	100% 100%	78,57% Sosial 12 Dokumen	Terdistribusi jumlah teknikatur dan jasa pada pelatihan kerja Menyusun Indikator Kegiatan Kompetensi	78,57%
Analisis Dokumen Perizinan	<p>1. Terelaksirasi Dokumen laporan 2. Rekomendasi lama</p>	Jurusan Dokumen Penitiran Bencana Rekomendasi lama	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	0 Sosial	0	0
Analisis Bahan Pengawasaran Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<p>1. Terelaksirasi Bahan Analisa data 2. Wajib Lapor or ketengakehan</p>	Jurusan Dokumen Analisa Data Wajib Lapor Ketengakehan	12 Dokumen 12 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen	Sosial	50%	50%
Analisis Bahan Peningkatkan Produktivitas	<p>1. Terelaksirasi analisis data 2. Imbalan Social Keterpaduan</p>	Jurusan Dokumen Analisa Data Keterpaduan Imbalan Social Keterpaduan	12 Dokumen 12 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen	Sosial	50%	50%
Analisis Bahan Persyaratan Kerja	<p>1. Terelaksirasi Bahan Analisa data 2. Perbaikan Produk</p>	Jurusan Dokumen Analisa Persyaratan Kerja Produk dan Perbaikan	12 Dokumen 12 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen	Sosial	50%	50%

KURKIN E-KINO TRIWULAN III
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi				Data Dukung Atas Realisasi Capaian			Catatan Efektif dan Kinerja RPJMD yang dijawab		Catatan Evaluasi Kemenpan RB
				PK	Renstra	Renja	Triwulan TW III	Menjelaskan Outcome / Keluaran IKU	Target Triwulan TW III	Rencana Aksi	Efisiensi		
				Triwulan TW III		Realisasi	Kesuksesan Rumus	Realisasi dan Rumus Dalam IKU	Menjelaskan Kendala (GM)	Aternatif Solusi / Inovasi	Indikator	Progres Realisasi	
		Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanannya Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	600 M	600 M	600 M	65%	65%	65%	97,0% Selesai	Realisasi investasi Cenderung menurun	Realisasi (metris)	6,10% Berdasarkan Laporan TW III	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Dari Dinas	Nilai Realisasi Investasi								Menurunkan Risiko untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		145,69% Berdasarkan Laporan TW III	
2	Meningkatnya Persepsi dan Tengah Persepsi yang Tercapai	Persepsi yang tercapai yang Tercapai								Peningkatan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Dinas		100% * annual per tahun	
3	Bertambahnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (ICBIS)	69,6	69,6	69,6	90%	90%	90%	70,3% Selesai	Sektor atau Penggunaan Publik Akhirnya memperoleh persetujuan dan pembangunan kpp		77,81% Data KMA dan BPS	
4	Meningkatnya Persepsi dan Tengah Persepsi	Persepsi yang tercapai yang Tercapai								Optimisme Perihal Inovasi dan Pengembangan		Keterkaitan dengan Tingkat Efisiensi	
		Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanannya Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	71 (8)	71 (8)	71 (8)	0	Selesai			Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		0% Akuratitas Kewajiban	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kewajiban	Nilai Akuratitas Laporan Kewajiban				100%	100%	100%	70% Selesai	Menyediakan informasi yang akurat dan relevan		0% Miring pada Implementasi	
2	Meningkatnya Peliputan Samaan Presensi dan Administrasi Pelaporan	Presensi dan Administrasi Pelaporan				100%	100%	100%	100% Selesai	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		75%	
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	75%	75%	75%								
1	Terhadasanya Penyelesaian Perencanaan dan Pelaporan	Persepsi Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				100%	100%	100%	100% Selesai	Menyediakan informasi yang akurat dan relevan		75%	
2	Terhadasanya Penyelesaian Perencanaan dan Pelaporan	Persepsi Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				100%	100%	100%	100% Selesai	Menyediakan informasi yang akurat dan relevan		75%	
		Kepala Sub Bagian Keuangan	75%	75%	75%								
1	Terhadasanya Pelaporan Administrasi Keuangan	Persepsi Layanan Administrasi Keuangan Mengalih				100%	100%	100%	100% Selesai	Menyediakan informasi yang akurat dan relevan		75%	
		Bendahara	75%	75%	75%								
1	Terbitnya Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen diberi tanda tangan/tanda tangan				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		75%	
2	Terbitnya Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen laporan pertanggungjawaban khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		75%	
3	Terbitnya Administrasi Keuangan	Jumlah laporan Perangkaan/penilaian Administrasi				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		75%	
4	Terbitnya Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Buku Pembantu Projek				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		75%	
5	Terbitnya Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Perjalanan Bulanan				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		75%	
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kegawaiannya	75%	75%	75%								
1	Terhadasanya Pelajaran Administrasi Kepegawaian	Persepsi Layangan Administrasi Kepegawaian Mengalih				100%	100%	100%	100% Selesai	Menyediakan informasi yang akurat dan relevan		75%	
2	Terhadasanya Pelajaran Administrasi Kepegawaian	Persepsi Layangan Administrasi Kepegawaian Mengalih				100%	100%	100%	100% Selesai	Menyediakan informasi yang akurat dan relevan		75%	
3	Terhadasanya Pengalihan Barang Bantuan	Persepsi Pengalihan Barang Milik Derah Mengalih				100%	100%	100%	100% Selesai	Menyediakan informasi yang akurat dan relevan		75%	
4	Terhadasanya Pengalihan Barang Bantuan	Persepsi Pengalihan Barang Milik Derah Mengalih				100%	100%	100%	100% Selesai	Menyediakan informasi yang akurat dan relevan		75%	
5	Terhadasanya Pengalihan Barang Bantuan	Persepsi Pengalihan Barang Milik Derah Mengalih				100%	100%	100%	100% Selesai	Menyediakan informasi yang akurat dan relevan		75%	
		Penyusunan Kebutuhan Barang Inventaris	75%	75%	75%								
1	Terhadasanya Data Inventaris	Jumlah Data Inventaris				12	12	12	9	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		75%	
2	Terhadasanya Data Inventaris	Jumlah barang inventaris											
3	Terhadasanya Data Inventaris	Jumlah barang inventaris											
4	Terhadasanya Data Inventaris	Jumlah barang inventaris											
		Pengelolaan Inventaris Umum	75%	75%	75%								
1	Terhadasanya Data Surat Masuk	Jumlah Surat Masuk				200	200	200	200	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		98%	
2	Terhadasanya Data Surat Masuk	Jumlah Surat Masuk				200	200	200	200	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		98%	
3	Terhadasanya Data Surat Masuk	Jumlah Surat Masuk				200	200	200	200	Senarai tuntutan teknis belum memenuhi		98%	

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal

1. Mengelola Sistem Investasi	Jumlah Sistem Investasi	1 Pemerintah Investasi: 1 Pemerintah Investasi	0 %
Dilakukan	Nihil	Nihil	0 %
2. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat	Nihil	Nihil	0 %
3. Mengelola Keberlabuhan	Reveneu Pelabuhan San yang Mengalihpindah Lpwn	100%	100%
Pengembangan LPTM			100% Sejauh

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

1. Melakukan Pembinaan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	Sejauh
2. Terdirinya Objektif Data	Jumlah Peraturan Bantuan Hukum & Pendukung Sektors	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %
3. Meningkatkan Keterlibatan	Peraturan Pelabuhan San yang Mengalihpindah Lpwn	100%	100%	100%	Sejauh
Praktisitas dan Kesiapan	Peraturan Pelabuhan San yang Mengalihpindah Lpwn	100%	100%	100%	Sejauh
4. Terdirinya Sistem Pengelolaan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pengelolaan	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	323 Pelaku Usaha	Sejauh
Investasi Perencanaan dan Pengelolaan	Reveneu Pelabuhan San yang Mengalihpindah Lpwn	55 Pelaku Usaha	55 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	Sejauh
5. Terusanya Strategi Pelaksanaan	Jumlah Strategi Perencanaan Model yang Disusun 1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %
Promosi dan Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Penanaman Modal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	Sejauh
6. Terdirinya Sistem Pengelolaan dan Pengawasannya	Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Penanaman Modal	88	88	88	0 %

Kepala Bidang Perizinan Perusahaan dan Non Perusahaan

1. Mengelola Layanan Perizinan	Jumlah Survey di Masa Terakhir Pelaksanaan	0 %	0 % Realisasinya di Masa Terakhir Pelaksanaan
Layanan Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang %	93 Layanan	93 Layanan Perizinan
Terintegrasi	Perizinan	84 Layanan Perizinan	84 Layanan Perizinan
2. Analisa dan Pengaruhnya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat Bantuan, Analisa dan Pengaruhnya	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha
Bidang Perizinan	Analisa dan Pengaruhnya	441 Pelaku Usaha	441 Pelaku Usaha
3. Terusnya Pengelolaan	Percentase Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar	100%	100%
Pertama dan Non Pertama Sesuai	SGP (Perizinan Non Sesuai)	100%	100%

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

1. Terdirinya Pengelolaan dan Perizinan	Jumlah Dokumentasi Perizinan Serta Raha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %
2. Analisa dan Pengaruhnya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat Bantuan, Analisa dan Pengaruhnya	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	441 Pelaku Usaha	Sejauh
Bidang Perizinan	Analisa dan Pengaruhnya	441 Pelaku Usaha	441 Pelaku Usaha	441 Pelaku Usaha	Sejauh
3. Terusnya Pengelolaan	Percentase Realisasi Perizinan dan Non Perizinan yang %	100%	100%	100%	Sejauh
Pertama dan Non Pertama Sesuai	SGP (Perizinan Non Sesuai)	100%	100%	100%	Sejauh

Analis Dokumen Perizinan

1. Terdirinya Dokumen Sopan	Jumlah Dokumentasi Perizinan Serta Raha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %
Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %
2. Sistem Informasi	Percentase Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	Sejauh
Sistem Informasi	Percentase Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	100%	Sejauh

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

1. Terdirinya Layanan Komunitas	Jumlah Layanan Komunitas dan Perpaduan Masyarakat	621 Layanan	60 Layanan	53 Layanan	Sejauh
Masyarakat	Perpaduan Masyarakat	591 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	Sejauh
2. Terdirinya Data dan Informasi	Percentase Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	Sejauh
Perizinan dan Non Perizinan	Percentase Kualitas/Kota Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Sejauh
3. Terdirinya Data dan Informasi	Percentase Perizinan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang %	100%	100%	100%	Sejauh
Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang %	100%	100%	100%	Sejauh
4. Terdirinya Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha Sistem Perizinan Perizinan Berusaha Terintegrasi	13 Data	13 Data	13 Data	Sejauh
Pertama dan Non Pertama	Percentase Perizinan Berusaha Terintegrasi	100%	100%	100%	Sejauh
yang Terintegrasi	SGP (Perizinan Non Sesuai)	100%	100%	100%	Sejauh

Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja

1. Mengelola Pemerintahan	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	50%	50%	63%	Sejauh
Kesepakatan	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	50%	50%	63%	Sejauh
2. Mengelola Keterpaduan dan Kesiapan	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	50%	50%	63%	Sejauh
Perizinan dan Non Perizinan	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	50%	50%	63%	Sejauh
3. Terdirinya Sistem Informasi	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	50%	50%	63%	Sejauh

JF Pengantar Kerja Ahli Muda

1. Terdirinya Sistem Informasi	Jumlah Dokumentasi Analisis Data Pekerja Terpadat	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Sejauh
Pekerja Terpadat	Percentase Informasi Pekerja Terpadat	25%	25%	25%	Sejauh
2. Mengelola Data dan Dampak	Percentase PTSP Pengaruh	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Sejauh
Mengelola Data dan Dampak	Percentase PTSP Pengaruh	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Sejauh
3. Terdirinya Sistem Informasi	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	50%	50%	63%	Sejauh

Analis Tengah Kerja

1. Mengelola Rahn analisis data	Jumlah Dokumentasi Analisis Data Pekerja Terpadat	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Sejauh
Pekerja Terpadat	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	25%	25%	25%	Sejauh
2. Mengelola Data dan Dampak	Percentase PTSP Pengaruh	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Sejauh
Mengelola Data dan Dampak	Percentase PTSP Pengaruh	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Sejauh
3. Terdirinya Sistem Informasi	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	50%	50%	63%	Sejauh

JF Pengantar Kerja Ahli Muda

1. Terdirinya Sistem Informasi	Jumlah Dokumentasi Analisis Data Pekerja Terpadat	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Sejauh
Pekerja Terpadat	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	25%	25%	25%	Sejauh
2. Mengelola Data dan Dampak	Percentase PTSP Pengaruh	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Sejauh
Mengelola Data dan Dampak	Percentase PTSP Pengaruh	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	Sejauh
3. Terdirinya Sistem Informasi	Percentase Keseimbangan Kerja yang Cepat	50%	50%	63%	Sejauh

Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial	0% Belum Diketahui (0)
1. Mengelolanya Kaliwa Tengah Dua atau tiga	Percentage : Engga Tahu Terimakasih Seusai keadaan
2. Terciptanya Meningkat Industri yang Harmonis	Percentage : Saya/Saya Pengetahuan Hubungan Industri masih ringan
3. Terwujudnya Kondisi Produktifitas dan Produktivitas bagi Perusahaan/Kerjanya	Percentage : Pengetahuan Produkifitas Wirausaha Kecil
4. Terwujudnya Kompetensi dan Pemahaman Terhadap Ahli Muda	Percentage : Jumlah orang yang Kompeten
5. Terwujudnya Pengembangan Kompetensi dan Pemahaman Terhadap Ahli Muda	Percentage : Jumlah orang yang Kompeten
JF Pengantar Kerja Ahli Muda	0% Seuall
1. Terwujudnya Fasilitas yang Berkualitas Komitmen Dalam Kerja	Jumlah PTKS yang mendukung Realisasi Sosial
2. Terciptanya Meningkat Industri yang Harmonis	100% Seuall
3. Terwujudnya Kompetensi dan Pemahaman Terhadap Ahli Muda	100% Seuall
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	0% Seuall
1. Terwujudnya Meningkatnya Efisiensi Kerja yang tinggi dan Layak Ketika dengan Tujuan Kerja yang Tinggi, Besar, yang Spesifik	Jumlah Dokumen yang Pengelolaan Meningkat
2. Terwujudnya Meningkatnya Pengelolaan dan Pengelolaan kerja yang Efektif dan Efisien	Percentage : Terhadap kerja yang Efektif
3. Terwujudnya Hubungan Industrial yang Baik	Percentage : Analisis kerja yang Efektif
Analis Bahau Penyertaan Kerja	0% Seuall
1. Terwujudnya Bahau Analisis Penyertaan kerja	Jumlah Dokumen Analisis Penyertaan kerja
Analis Bahau Pengawasan Ketengakaklian dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	0% Seuall
1. Terwujudnya Bahau Analisis Data Wajib Lapor Ke Manajemen dan Ke Pengawas	Jumlah Dokumen Analisis Data Wajib Lapor
2. Terwujudnya Analisis dan Jaminan Sosial Kelembagaikan	Jumlah Dokumen Analisis Data Keperluan Jaminan Sosial Kelembagaikan
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	0% Seuall
1. Terwujudnya Ciri-Ciri Teknik Kerja yang Kompeten	Percentage : Persepsi terhadap teknik kerja yang Kompeten
Kepala Sub Balai Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	0% Seuall
1. Terwujudnya Dokumen Administrasi Umum UPT di Bali Lahiran Kerja Yang Baik	Percentage : Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT di Bali Lahiran Kerja Yang Baik
2. Terwujudnya Dokumen Administrasi Kepegawaian UPT Balai Latihan kerja yang baik	Percentage : Dokumen Administrasi Kepegawaian UPT Balai Latihan kerja yang baik
3. Terwujudnya Pendekatan Iasa Penugasan UPT Balai Latihan Kerja Yang Baik	Percentage : Pendekatan Iasa Penugasan UPT Balai Latihan Kerja Yang Baik
Pengadministrasiat Umum	0% Seuall
1. Terwujudnya Dokumen Administrasi Umum Balai Latihan Kerja	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Balai Latihan Kerja
Kepala Bidang Transmigrasi	0% Seuall
1. Mengelolanya Wangsa Transmigrasi yang Terampil	Percentage : Wangsa Transmigrasi yang Terampil
2. Mengelolanya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Percentage : Lahan tanah yang diolah oleh Wangsa Transmigrasi
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	0% Seuall
1. Terikatannya Pendukung Perbaikan Pendidikan yang Sistematis di Wilayah	Jumlah Wangsa Transmigrasi yang Terampil
Penyuluhan Transmigrasi	0% Seuall
1. Terikatannya Kebijakan Penggunaan Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang ditanam situs pemukiman	20%

Mengetahui
Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
PEMERINTAH KABUPATEN BALI
**Dinas Perdagangan dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi
dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**
BALI, 10 JULI 2021
G. L. A. L. A. N. G. Y. D. M. A. P.
Surat nomor : 10021002



DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERTPADU SATU PINTU, TRANSIMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target				Realisasi	Data Dukung Atas			Catatan Efektif dan Kinerja RPJMD yang dijawab		Catatan Evaluasi Kemenperin RB
			PK	Renstra	Renja	Triwulan IV		Kesesuaian Rumus	Menjelaskan Outcome / Keluaran IKU Dalam IKU	Menjelaskan TW IV	Target Triwulan TW IV	Menjelaskan	Alternatif Solusi / Inovasi
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Tertpadu Satu Pintu, Transimigrasi dan Tenaga Kerja													
1	Meningkatkan Realisasi investasi Dalam Nilai Realisasi Investasi	Peningkatan Penyelesaian Tenaga Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	600 M	600 M	633.029 M	Selesai	Realisasi Investasi TW IV	Realisasi Investasi TW IV	61,07% Berdasarkan RPJMD TW III	Realisasi Investasi	Realisasi Investasi
2	Meningkatkan Penyelesaian Tenaga Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	65%	65%	57,30% Selesai	Perbaikan tidak mendapat respon karena ketidakmampuan teknologi	Perbaikan tidak mendapat respon karena ketidakmampuan teknologi	Perbaikan tidak mendapat respon karena ketidakmampuan teknologi	1,65% Berdasarkan RPJMD	Agustus 2022	Agustus 2022
3	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (IKB) 100%	Indeks Kemudahan Berinvestasi (IKB)	Indeks Kemudahan Berinvestasi (IKB)	88	88	88	Komoditas Berusaha	Kemudahan Berusaha	Kemudahan Berusaha	100,66% Realisasi ditingkat Tinggi	Bulan September	Bulan September
4	Meningkatkan Pelatihan dan Pelajaran	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	90%	90%	90%	Jumlah Tenaga kerja yang terlatih	Bilangan database pelaku usaha terlatih mencapai database pelatihan	Bilangan database pelaku usaha terlatih mencapai database pelatihan	102,33% Data WNA dan BPJS	Kelengkapan perijinan	Kelengkapan perijinan
Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Tertpadu Satu Pintu, Transimigrasi dan Tenaga Kerja													
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Nasionalisme Komite (Nasko)	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja	71 (8)	71 (8)	71 (8)	0 Selesai	Perbaikan dengan sedang berlangsung	Perbaikan dengan sedang berlangsung	0 Meningkatkan Laporan Hasil Evaluasi	Perbaikan dengan sedang berlangsung	Perbaikan dengan sedang berlangsung
2	Meningkatkan Penyelesaian dan Pelaporan	Evaluasi dan Penilaian	Evaluasi dan Penilaian	Evaluasi dan Penilaian	90%	90%	90%	91% Selesai	Kesalahan dalam sistem Aset	Kesalahan dalam sistem Aset	101,11% Semua	Bulanan	Bulanan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan													
1	Meningkatkan Penyelesaian dan Pelaporan	Evaluasi dan Penilaian	Evaluasi dan Penilaian	Evaluasi dan Penilaian	100%	100%	100%	Dokumen Perencanaan	Padatnya agenda perencanaan dan pembahasan	Padatnya agenda perencanaan dan pembahasan	00%	Perbaikan dengan sedang berlangsung	Perbaikan dengan sedang berlangsung
Kepala Sub Bagian Keuangan													
1	Teruskan dan Lanjutkan pelaksanaan dan penyelesaian dari kegiatan yang belum selesai	Penyelesaian dan pelaksanaan	Penyelesaian dan pelaksanaan	Penyelesaian dan pelaksanaan	100%	100%	100%	Bulangan laporan menyatakan SPT	Melakukan pencatatan dengan 15 sebagian Gu tercatat	Melakukan pencatatan dengan 15 sebagian Gu tercatat	00%		
Bendahara													
1	Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen dari Transaksi harian/bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%	100%	100%		
2	Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan pertanggungan tahunan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%	100%	100%		
3	Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pengajuan Biaya Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%	100%	100%		
4	Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bukti Pembuktian Pagak	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%	100%	100%		
5	Terbitnya Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Laporan Pakai Sutan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%	100%	100%		
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiwan													
1	Kepatuhan Peraturan Administrasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	100%	100%	100%	100% Selesai	Ada beberapa data koperasi yang belum dicatat	Ada beberapa data koperasi yang belum dicatat	100%		
2	Terbitkan Peraturan Administrasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	100%	100%	100%	100% Selesai	Perbaikan ketidaktahuan teknis terpenuhi	Perbaikan ketidaktahuan teknis terpenuhi	100%		
3	Terbitkan Peraturan Administrasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	100%	100%	100%	100% Selesai	Berdasarkan laporan tidak ada keterangan	Berdasarkan laporan tidak ada keterangan	100%		
4	Terbitkan Peraturan Administrasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	100%	100%	100%	100% Selesai	Data pengajuan perubahan yang berlaku	Data pengajuan perubahan yang berlaku	100%		
5	Terbitkan Peraturan Administrasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	100%	100%	100%	100% Selesai	Menyusulkan ketidaktahuan anggota	Menyusulkan ketidaktahuan anggota	100%		
6	Terbitkan Peraturan Administrasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	Peraturan dan administrasi koperasi	100%	100%	100%	100% Selesai	BMO perlu perbaikan	BMO perlu perbaikan	100%		
Penyediaan Kebutuhan Barang Inventaris													
1	Tersebar dan Data Inventaris Baru	Jumlah data inventaris baru	12	12	12	12	12	Selesai	100%	100%	100%		
2	Tersebar dan Koperasi	Jumlah data inventaris baru	2	2	2	2	2	Selesai	600%	600%	600%		
3	Tersebar dan Pengadaan	Jumlah data inventaris baru	120	120	120	120	120	Selesai	100%	100%	100%		
4	Tersebar dan Pengadaan	Jumlah data inventaris baru	12	12	12	12	12	Selesai	100%	100%	100%		
Pengelolahan Inventaris													
1	Tersebar dan Data Inventaris Baru	Jumlah data inventaris baru	12	12	12	12	12	Selesai	100%	100%	100%		
2	Tersebar dan Pengadaan	Jumlah data inventaris baru	200	200	200	200	200	Selesai	100%	100%	100%		
3	Tersebar dan Dokumen	Jumlah data inventaris baru	200	200	200	200	200	Selesai	100%	100%	100%		
Pengelolahan Dokumen													
1	Kelengkapan Dokumen	Jumlah data inventaris baru	12	12	12	12	12	Selesai	100%	100%	100%		
2	Tersebar dan Pengadaan	Jumlah data inventaris baru	200	200	200	200	200	Selesai	100%	100%	100%		
3	Tersebar dan Dokumen	Jumlah data inventaris baru	200	200	200	200	200	Selesai	100%	100%	100%		
Pengelolahan Koperasi													
1	Tersebar dan Data Inventaris Baru	Jumlah data inventaris baru	12	12	12	12	12	Selesai	100%	100%	100%		
2	Tersebar dan Pengadaan	Jumlah data inventaris baru	200	200	200	200	200	Selesai	100%	100%	100%		
3	Tersebar dan Dokumen	Jumlah data inventaris baru	200	200	200	200	200	Selesai	100%	100%	100%		

	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
1. Mengelola klim investasi di bawah Lurah Seksi, Potensi Investasi	Jumlah investor/Pelaku Usaha yang beroperasi dalam area/konstruksi dan keuangan	1. Objeksi investasi Investasi 210 M	210 M	210 M	100%	100% Selesai
2. Mengelola Rencana/Mudah Investasi	Nilai Perdagangan Investasi/Berencana Investasi	1 Potensi Investasi	1 Potensi Investasi	1 Potensi Investasi	100%	100% Selesai
3. Mengelola Kelembagaan Penyampaian Investasi	Jumlah pelaku usaha yang Memperbaiki ULM	100%	100%	100%	100% Selesai	
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Jumlah investor/Pelaku Usaha yang beroperasi dalam area/konstruksi dan keuangan	200 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha	181 Pelaku Usaha	100%	Selesai
1. Mengelola Pertumbuhan Inovasi dan Inovasi dalam kerawanan	Lurah Pelaku Usaha yang beroperasi dalam area/konstruksi dan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100% Selesai
2. Terelihayi Objeksi Dafar/Potensial Investasi	Lurah Pelaku Usaha yang Berada di Sektor Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100% Selesai
3. Terelihayi Pembatasan Peruntukan LOPA Konsep Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Peruntukan 300 Pelaku Usaha 300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	323 Orang	100%	100% Selesai
4. Terelihayi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dikenakan Pengawasan 35 Pelaku Usaha 35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	41 Pelaku Usaha	117%	117% Selesai
5. Terelihayi Standar Perkembangan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Standar Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100% Selesai
6. Terelihayi Penilaian dan Analisis Investasi/Peranaman Modal	Dewan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	100% Selesai
Kepala Bidang Pelatihan Penitinan Berusaha dan Non Berusaha	1. Mengelola Pelatihan Penitinan Berusaha dan Non Berusaha	88	88	88	88	88
1. Mengelola Pelatihan Penitinan Berusaha dan Non Berusaha	Nilai Survey AWA Terhadap Pelatihan	Nilai Survey AWA Terhadap Pelatihan	Nilai Survey AWA Terhadap Pelatihan	Nilai Survey AWA Terhadap Pelatihan	100,66%	100,66% Pelatihan dilaksanakan oleh pelatih pelatihan
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	1. Mengelola Pelatihan Penitinan Berusaha dan Non Berusaha	124% Layanan Perizinan Terintegrasi	114% Perizinan Bisnis & Sosial	114% Perizinan Bisnis & Sosial	114% Perizinan Bisnis & Sosial	100% Layanan Perizinan
1. Terelihayi Pengelajuan Layanan Perizinan	Lurah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tinggal di Sosial Online	93 Layanan Perizinan	93 Layanan Perizinan	93 Layanan Perizinan	100% Selesai	100% Layanan Perizinan
2. Terelihayi Penitinan Analisis, evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Layanan Usaha yang Mendapat Perintah, 300 Pelaku Usaha 300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	572 Pelaku Usaha	100%	100% Selesai
3. Terelihayi Pengelajuan Pelatihan dan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan	Pengelajuan dan Pelaporan di Bidang Perizinan Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	100%	100%	100%	100%	100% Selesai
Analis Dokumen Perizinan	1. Terelihayi Dokumentasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100% Selesai
1. Mengelola Dokumentasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan yang Terdokumentasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100% Selesai
2. Terelihayi Layangan Konsumsi dan Pengelajuan Pengelajuan Pengelajuan dan Non Perizinan	Mengelajuan dan Non Perizinan yang Terdokumentasi	100%	100%	100%	100%	100% Selesai
JF Analis Kebijakan Ahli Muda	1. Terelihayi Layangan Konsumsi dan Pengelajuan Pengelajuan Pengelajuan dan Non Perizinan	100% 73 Layanan Konsumsi Pengelajuan	100% 73 Layanan Konsumsi Pengelajuan	100% 73 Layanan Konsumsi Pengelajuan	100%	100% Selesai
1. Terelihayi Data dan Informasi Kebutuhan/Kota Non Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layangan Konsumsi dan Pengelajuan Non Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	100%	100% Selesai
2. Terelihayi Data dan Informasi Kebutuhan/Kota Non Perizinan dan Non Perizinan	Perelihayi Kebutuhan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	100%	100% Selesai
3. Terelihayi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipersiapkan	100%	100%	100%	100%	100% Selesai
4. Terelihayi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipersiapkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dipersiapkan	100%	100%	100%	100%	100% Selesai
Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenada Kerja	1. Mengelola Penemahan Kelembagaan Perizinan dan Non Perizinan	50%	50%	50%	50%	50%
1. Mengelola Penemahan Kelembagaan Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan yang Terpenuhi	50%	50%	50%	50%	50%
2. Mengelola Kelembagaan Tenaga Kerja dan Non tenaga kerja	Jumlah Tenaga kerja dan Investasi Bina	550 Orang	550 Orang	550 Orang	100%	100% Selesai
JF Pengantar Kerja Ahli Muda	1. Terelihayi Penemahan Kelembagaan Antara Ketereduan dan Kebutuhan Tenaga Kerja	70%	70%	70%	70%	70%
1. Terelihayi Penemahan Kelembagaan Antara Ketereduan dan Kebutuhan Tenaga Kerja	Batu Perorangan Terbagi Kepada Komunitas	70%	70%	70%	70%	70%
2. Mengelola Kelembagaan Tenaga Kerja dan Non tenaga kerja	Perorangan dan Diklat	100%	100%	100%	100%	100% Selesai
3. Terelihayi Penemahan Kelembagaan Antara Kepada Komunitas	Perorangan dan Diklat	25%	25%	25%	25%	25%
	1. Terelihayi Penemahan Kelembagaan Antara Kepada Komunitas	50%	50%	50%	50%	50%
	2. Mengelola Kelembagaan Antara Kepada Komunitas	50%	50%	50%	50%	50%
	3. Terelihayi Penemahan Kelembagaan Antara Kepada Komunitas	50%	50%	50%	50%	50%

Analis Tenaga Kerja Ahli Muda	1. Mengipas Zahar Analis Data Pemerintah Lurah Dokumen Analisis Data Pemerintah Kepala Desa Terdapat Zahar Analisis Data Lurah Zahar Dinas Perizinan dan Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
	2. Mengipas Zahar Data Informasi Pemerintah Lurah Zahar Dinas Perizinan dan Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
	3. Mengipas Zahar Data Informasi Pemerintah Lurah Zahar Dinas Perizinan dan Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Ketenagakerjaan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	1. Mengipas Zahar Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	60%	60%	83,57%	Selesai	Kualifikasi/abilitas terhadap kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan keturunan dari kerja Masa berpengalaman kerja minimal yang belum dicapai pada saat ini
	2. Teriklaim Zahar Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	Selesai
JF Pengantar Kerja Ahli Muda	1. Teriklaim Zahar Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	10,1%	10,1%	10,1%	Selesai	100%
	2. Teriklaim Zahar Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	Selesai
	3. Teriklaim Zahar Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Selesai
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	1. Teriklaim Zahar Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	Selesai
	2. Teriklaim Zahar Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	Selesai
Analis Bahan Persyaratan Kerja	1. Teriklaim Zahar Analis Persyaratan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
	2. Teriklaim Zahar Analis Persyaratan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
Analis Bahan Penggunaan Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja (K3)	1. Teriklaim Zahar Analis Data Kesehatan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
	2. Teriklaim Zahar Analis Data Kesehatan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	1. Teriklaim Zahar Analis Persyaratan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
	2. Teriklaim Zahar Analis Persyaratan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	1. Teriklaim Zahar Analisis Administrasi Umum Di Balai Latihan Kerja	100%	100%	100%	Selesai	100%
	2. Teriklaim Zahar Analisis Administrasi Kepegawaian Di Balai Latihan Kerja	100%	100%	100%	Selesai	100%
	3. Teriklaim Zahar Analisis Administrasi Kepegawaian Di Balai Latihan Kerja	100%	100%	100%	Selesai	100%
Pengadmindistrasi Umum	1. Teriklaim Zahar Analisis Administrasi Umum Di Balai Latihan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
	2. Teriklaim Zahar Analisis Administrasi Umum Di Balai Latihan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Selesai	100%
Kepala Bidang Transmigrasi	1. Mengiklaim Zahar Kepala Bidang Transmigrasi yang Dapat diwakili oleh Zahar	15%	19,05%	19,05%	1,60%	Selesai
	2. Mengiklaim Zahar Kepala Bidang Transmigrasi yang Dapat diwakili oleh Zahar	19,05%	19,05%	19,05%	18,84%	Selesai
Penyuluh Transmigrasi	1. Teriklaim Zahar Kepala Bidang Transmigrasi yang diberikan komenditasi statut Penyuluh	20 kk	20 kk	20 kk	Selesai	100%

Kepala Dinas Penanaman Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Mengetahui



MAP

1002